

PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI DALAM MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

Oleh: Tjutju Fatimah*

ABSTRACT

Solution to overcome the unemployment problems can be done by the way of making someone who expert in entrepreneur. Because an entrepreneur hardly assists government in chartered investment counsel recovery. Because they stand in adding national production, creates job activity opportunity, assists government to lessen unemployment, assists government in development averaging, adds resource of stock-exchange for government, adds source of national income with paying tax, and assists government in enriching nation.

Keywords: Street trader, poorness, unemployment.

Pendahuluan

Dalam perkembangannya, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan perkotaan Indonesia seringkali dijumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulang kali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. PKL dipandang sebagai bagian dari masalah (*part of problem*) dalam ketertiban. Upaya penertiban, sebagaimana sering diekspose oleh media televisi acapkali berakhir dengan bentrokan dan mendapat

perlawanan fisik dari PKL sendiri. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa.

Pada hal, sejatinya bila keberadaannya dipoles dan ditata dengan konsisten, keberadaan PKL ini justru akan menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di tengah-tengah kota. Hal ini bisa terjadi apabila PKL dijadikan sebagai bagian dari solusi (*part of solution*). Dalam konteks penumbuhan enam juta unit usaha baru sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil, maka sasaran utama program seyogyanya ditujukan kepada PKL; dan sudah teruji sebagai bibit *entrepreneur* untuk diberdayakan menjadi unit usaha baru yang tangguh serta mampu mengatasi pengangguran.

* Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Kemitraan Publik dan Swasta

Stakeholders mendukung perlunya dilakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) secara *sistemik*. Pemerintah ingin kotanya tertata apik, bersih, rapih, tertib, dan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Di sisi PKL mendambakan kenyamanan berusaha tanpa digusur-gusur agar tenang dalam menjalankan usahanya untuk mencari nafkah. Sektor formal (swasta, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, BUMN, BUMD, dan lain-lain) menginginkan pengelolaan usaha dan pemerintah yang baik tanpa diganggu oleh PKL. Aparat Satpol dan Trantibpun tidak pernah mengharapkan bentrokan fisik dengan PKL. Untuk itu, penulis menawarkan konsep kemitraan publik dan swasta. Kerangka berpikirnya sangat sederhana. Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi menetapkan lokasi, mendaftarkan, mengawasi, mengendalikan, dan mempromosikan lokasi PKL tersebut. Pemerintah pusat membantu akses pendanaannya baik melalui APBN maupun skim perkreditan yang didesain untuk usaha mikro atau sektor informal. Sedangkan swasta, BUMN, BUMD, Usaha Besar, dan UKM menjadikan lokasi PKL tersebut sebagai sarana promosi produknya. Konsepsi ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kemitraan yang melibatkan semua

stakeholders di atas sudah ada dan dapat dilihat misalnya di tepi pantai Kota Makassar yang dikenal dengan lokasi Pantai Losari. Usulnya adalah bagaimana hal ini dijadikan sebagai gerakan nasional. Payung hukum sebagai dasar berpijak dari kemitraan publik dan swasta ini dapat diturunkan dari UU No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Program konkrit kemitraan dapat dielaborasi dari jiwa pesan UU No.9/1995 tersebut untuk penataan PKL dalam menumbuhkan 6 juta unit usaha baru yang berkualitas. Jika ada kepastian seperti itu maka para sarjana baru akan berlomba menjadi pelaku usaha yang berawal dari PKL. Di sanalah dia akan menimba pengalaman bagaimana cara berwiraswasta yang baik. Alam dan lingkungan akan menjadi dosen mereka. Dengan demikian pada suatu saat nanti kita akan menyaksikan para sarjana berlomba jadi pengusaha-pengusaha mikro bukan berarti mendapatkan formulir sebagai pegawai negeri.

Kemiskinan dan Alternatif Solusi

Pengangguran

Masalah yang mendera masyarakat dan pemerintah bisa dikatakan tidak akan pernah usai. Permasalahan sosial, politik, ekonomi, bahkan teknologi, semuanya

masih berkelanjutan hingga kini. Ada satu permasalahan yang menarik karena permasalahan tersebut belum terselesaikan secara menyeluruh, yaitu permasalahan tentang pengangguran yang semakin meningkat. Permasalahan ini tergolong kepada permasalahan sosial ekonomi. Pasca krisis, bahkan hingga sekarang secara nasional angka pengangguran di negeri ini memang sangat tinggi. Permasalahan ini merupakan bom waktu bila tidak diselesaikan segera.

Pengangguran, bila dibiarkan terus, ini akan jadi bom waktu dan tidak sedikit pula orang yang nekad hidup yang menyerempet dunia kekerasan demi nafkah anak dan isterinya serta nekad melakukan tindak kriminal karena tidak mempunyai penghasilan. Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2003 meningkat satu juta jiwa dibandingkan tahun 2002. Bila di tahun 2002 pengangguran 8 juta jiwa maka tahun 2003 menjadi sekitar 9 juta jiwa; ini berarti sekitar 9% dari seluruh angkatan kerja. Angkatan kerja sekarang 100 juta. Demikian dikatakan oleh Ketua BPS, Soedarti Soerbakti, di Istana Negara usai peluncuran buku Perencanaan Tenaga Kerja Nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri Januari 2004. Angka 9 juta itu tidak termasuk data pengangguran terselubung. Angka pengangguran tersebut

dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terus meningkat. Dalam survei BPS periode Agustus 2004 sampai Februari 2005 jumlah angkatan kerja telah mencapai 105,8 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk yang bekerja dalam enam bulan yang sama hanya bertambah 1,2 juta orang, dari 93,7 juta menjadi 94,9 juta orang. Ini berarti menambah jumlah pengangguran baru 600 ribu orang atau rata-rata seratus ribu per-bulan. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2005 mencapai 10,3 % lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran Agustus 2004 sebesar 9,9%. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumberdaya yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan dan mendorong keresahan sosial dan kriminal serta dapat menghambat pembangunan jangka panjang.

Angka pengangguran terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, otomatis penyerapan tenaga kerja juga meningkat. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga yang terserap bisa mencapai 400 orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4%, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta orang per tahun. Ketidakstabilan politik dan keamanan

kemungkinan besar juga memperparah dan mengganggu sendi-sendi pembangunan lainnya. Bila hal ini benar-benar terjadi, Indonesia akan berada pada bibir kehancuran yang sulit dihindarkan. Sampai kapan Indonesia dapat bertahan dalam situasi seperti ini? Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, tingkat pengangguran pada angka 6%, saja sudah menimbulkan kegoncangan. Dengan demikian tingginya angka pengangguran dapat menjadi malapetaka bangsa yang tiada lain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh negara.

Tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi dapat dikarenakan arus globalisasi yang semakin pesat. Permasalahan tentang pengangguran sudah merajalela dari masyarakat mampu sampai masyarakat yang kurang mampu. Pengangguran itu biasanya mempunyai peluang untuk melakukan tindakan kriminal. Karena seseorang yang menganggur, sama dengan yang lainnya mempunyai suatu kebutuhan baik sandang, pangan dan papan. Apabila kebutuhan itu belum terpenuhi, maka setiap orang akan melakukan hal apapun agar segala sesuatu yang diinginkan tercapai. Apalagi kebutuhan akan pangan yang tak ada kompromi, apapun akan dilakukan

masyarakat jika sudah dihadapkan kepada faktor kebutuhan tersebut.

Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan. Pengangguran itu merupakan pemborosan sumberdaya dan potensi yang ada. Selain itu pengangguran juga merupakan beban keluarga dan masyarakat serta merupakan sumber utama dari kemiskinan serta dapat menghambat pembangunan nasional dalam jangka panjang. Pembangunan nasional ke depan, sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat secara mental dan fisik serta mempunyai keterampilan, keahlian dan kekreatifan sehingga mampu membangun keluarga yang berkecukupan. Karena dari keterampilan dan keahlian tersebut, setiap orang bisa menciptakan lapangan kerja dan mempunyai penghasilan yang layak. Masalah pengangguran tidak hanya menerpa masyarakat kalangan bawah saja. Masyarakat yang dirasa berkecukupan pun mengalami permasalahan tersebut. Banyak faktor yang mendukung terhadap permasalahan pengangguran, antara lain:

Faktor Kemiskinan. Banyaknya jumlah pengangguran itu dari kalangan masyarakat miskin. Karena untuk mendapatkan pekerjaan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Contohnya: di

suatu pabrik, untuk menjadi seorang karyawan di suatu pabrik tersebut, harus ada orang dalam yang membantunya dan menjamin pekerjaan dapat diraih; selain itu juga orang yang ingin masuk pabrik tersebut harus memakai jasa seorang calo dengan memberikan uang jerih payah. Nominal uang tersebut tidak sedikit; jadi kesimpulannya orang yang tidak mempunyai uang dia tidak bisa kerja.

Faktor Pendidikan. Banyaknya anak putus sekolah juga merupakan salah satu faktor yang menunjang pengangguran. Karena untuk bekerja di zaman sekarang, harus bisa 'calistung' (baca, tulis, hitung) minimal tamatan SLTP. Itupun hanya pekerjaan berkisar Pembantu Rumah Tangga (PRT), *Baby Sitter*, dan lain-lain. Namun, di era globalisasi sekarang sudah ada agen *baby sitter* dan PRT. Jadi semakin sulit anak yang putus sekolah itu mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan layak. Pendidikan juga belum ada kurikulum yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Faktor Keahlian. Untuk zaman sekarang, diperlukan manusia yang kreatif dan inovatif. Meskipun hanya lulusan SLTA, jika seseorang itu mempunyai keahlian dan keterampilan, maka orang

tersebut bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Contohnya: Membuat kue, membuat prakarya, dan lain-lain. Tetapi, masyarakat Indonesia pada umumnya malas untuk bekerja keras, bekerja dari nol, maka karena itu pula pengangguran tercipta.

Faktor Budaya. Telah disebutkan bahwa sindrom pengangguran tidak hanya terjadi di kalangan bawah saja. Namun, kalangan ataspun ada. Ini dikarenakan faktor budaya. Orang yang senantiasa hidup berkecukupan, ingin memperoleh pekerjaan yang layak. Sedangkan segala sesuatu itu harus mengalami proses yang jelas. Kebanyakan dari orang tersebut menginginkan kerja enak saja tanpa melakukan proses.

Faktor Pasaran. Kurangnya lapangan kerja, banyaknya masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan krisis ekonomi yang melanda negeri ini, juga rendahnya kualitas SDM yang kurang memenuhi standar di lapangan kerja tersebut.

Data menyebutkan bahwa sejumlah 36,7 persen dari penganggur terbuka ini berusia muda antara 15-24 tahun (Kompas, Sabtu 12 Februari 2005). Penganggur usia muda ini seharusnya adalah generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah. Maka telah terbukti, pembangunan nasional di Indonesia tergolong sangat lamban. Menteri

Tenaga Kerja Bomer Pasaribu mengungkapkan, hingga 10 tahun mendatang masalah pengangguran di Indonesia belum bisa dituntaskan, hanya bisa dikurangi. Penciptaan lapangan kerja sekarang ini hanya berkisar 1,5 juta sampai dua juta per tahun. Padahal di samping jumlah pengangguran sekitar 36 juta jiwa, setiap tahun ada sebanyak 2,5 juta sampai 3,5 juta pekerja baru yang masuk pasar tenaga kerja. (Kompas, Sabtu 24 Februari 2000).

Pengangguran terbuka bukanlah persoalan final yang mesti dihadapi. Masih ada angka pengangguran setengah terbuka, yakni tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per bulan. Menurut prediksi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) jumlah penganggur setengah terbuka tahun 2004 mencapai 28,93 juta orang atau 27,5 persen dari total angkatan kerja. (Kompas, Sabtu 12 Februari 2004). Permasalahan pengangguran ini berdampak buruk bagi pemerintah. Karena menghambat program pemerintah dalam pemerataan pembangunan, juga menghambat program pemerintah untuk memakmurkan bangsa Indonesia. Maka dari itu pemerintah membuat solusi-solusi untuk mengurangi pengangguran. Pengangguran tidak bisa dihilangkan tetapi hanya bisa dikurangi. Mengingat keadaan

ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri yang masih belum mapan.

Untuk mengatasi masalah pengangguran pemerintah telah membuat 5 kebijakan (Kompas, Sabtu 20 Februari 2000); antara lain:

1. Mengubah kebijakan politik ekonomi makro, agar merangsang pertumbuhan ekonomi yang kemudian bisa menciptakan lapangan kerja baru.
2. Membuat kebijakan fiskal dan moneter yang juga ramah terhadap tenaga kerja.
3. Membangkitkan kembali kegiatan di sektor riil terutama yang bergerak di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
4. Melakukan reformasi di bidang pertanahan. Selama ini tanah untuk kegiatan produksi lebih banyak dikuasai secara terbatas oleh kalangan terbatas pula.
5. Kebijakan kelima yang secara khusus sedang digarap Depnaker sekarang, ujar Pasaribu, melipatgandakan usaha peningkatan tenaga kerja di lingkungan keluarga yang berpendapatan kecil. Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan kelompok pengusaha kecil dan menengah dari Jepang.

Pemulihan ekonomi juga merupakan alternatif utama yang dilakukan pemerintah. Namun belum terlihat hasilnya, dikarenakan keadaan ekonomi Indonesia juga yang terlibat hutang dengan luar negeri. Pemerintah juga mengajukan 2 (dua) kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran, yaitu kebijakan makro (umum) dan kebijakan mikro (khusus). Kebijakan makro berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Sedangkan kebijakan Mikro dijabarkan menjadi beberapa poin (Suara Pembaruan Daily, 7 September 2004); antara lain:

- 1) Pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memiliki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.
- 2) Melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka

lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan.

- 3) Membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur.
- 4) Menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok.
- 5) Mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah, misalnya terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang.
- 6) Mengembangkan suatu lembaga antar kerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai *job center* dan dibangun serta dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Menyeleksi Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil (*skilled*).

- 7) Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan.
- 8) Upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur.
- 9) Mengembangkan potensi kelautan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis, sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan

Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif.

Pemberdayaan PKL Melalui Koperasi

Pada umumnya Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah *self-employed*, artinya mayoritas PKL terdiri dari satu dan atau beberapa tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif kecil dan terbagi atas modal tetap berupa peralatan dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi. Biasanya PKL mendapatkan dana atau pinjaman dari lembaga atau perorangan yang tidak resmi. Atau bersumber dari *supplier* yang memasok barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya. Hal ini sangat mudah dipahami karena rendahnya tingkat keuntungan PKL dan cara pengelolaan uangnya pun sangat sederhana. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil. Perlu ditambahkan, secara umum PKL termasuk dalam kategori yang mayoritas berada dalam usia kerja utama (*prime-age*) (Soemadi, 1993). Dalam pemberdayaan PKL, masing-masing pemerintah

kabupaten/kota mempunyai kebijakan yang berbeda satu sama lain. Misalnya pemerintah daerah Kotamadya Yogyakarta menyerahkan sepenuhnya pengelolaan PKL yang di Malioboro kepada PKL itu sendiri (Pengelolaan Malioboro Diserahkan ke PKL, Harian Bernas: 4 November 1999:3). Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan usahanya PKL menggunakan konsep dari PKL, oleh PKL, dan untuk PKL yang tampak dalam pembentukan organisasi PKL yang bersifat *bottom up* untuk mengorganisir PKL di Kawasan Malioboro. Keberadaan organisasi pedagang kaki lima sangat diperlukan di Kawasan Malioboro mengingat luasnya areal usaha dan banyaknya pedagang yang mencari penghidupan di kawasan tersebut. Selain itu, organisasi tersebut sekaligus dilibatkan untuk ikut menciptakan ketertiban dan keamanan di Kawasan Malioboro. Contoh lain, model pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Surakarta dalam tahun 2006 bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Upaya pemberdayaan PKL dilakukan dengan pendekatan pengembangan sarana usaha yang diiringi dengan upaya transformasi sektor informal menjadi sektor formal. Upaya transformasi tersebut tentunya melibatkan upaya pemberdayaan pelaku sektor informal untuk mengembangkan

kapasitas usahanya. Pemberdayaan tersebut, di sisi lain juga diiringi oleh kemudahan prosedur formalisasi kegiatan usaha oleh Pemerintah Daerah setempat. Kemudian model pemberdayaan PKL yang diperagakan oleh pemerintah DKI Jakarta juga salah satu contoh yang memiliki keunikan tersendiri. Pola PKL Blok S, dimana Pemerintah DKI Jakarta memodernisasi lokasi, sarana usaha, dan mempromosikannya ke masyarakat membuat sentra PKL tersebut menjadi lokasi yang lebih elite. Pola lainnya juga ada yang disebut 'Lokbin' alias lokasi binaan. Para PKL dihimpun dalam suatu lokasi tertentu; dengan demikian mereka memiliki kepastian lokasi berusaha.

Mencermati fenomena PKL di perkotaan, pedagang kaki lima sebagai individu warga masyarakat seyogyanya dipahami dalam konteks transformasi perkotaan. Pada hakekatnya mereka bukanlah semata-mata kelompok masyarakat yang gagal masuk dalam sistem ekonomi perkotaan. Mereka bukanlah komponen ekonomi perkotaan yang menjadi beban bagi perkembangan perkotaan. PKL adalah salah satu pelaku dalam transformasi perkotaan yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi perkotaan. Bagi mereka mengembangkan kewirausahaannya adalah lebih menarik

ketimbang menjadi pekerja di sektor formal kelas bawah. Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini lebih banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL di perkotaan. Konsep perencanaan tata ruang perkotaan yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk PKL. Kegiatan-kegiatan perkotaan didominasi oleh sektor-sektor formal yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Alokasi ruang untuk sektor-sektor informal termasuk PKL adalah ruang marginal. Sektor informal terpinggirkan dalam rencana tata ruang kota yang tidak didasari pemahaman informalitas perkotaan. Selanjutnya, PKL sering dipandang sebagai sektor informal yang berada di luar kerangka hukum dan pengaturan.

Akibatnya, penataan berupa kepastian usaha dan tempat menjadi terabaikan. Apabila kita dapat menerima alur pikir dan fakta yang disajikan di atas bahwa PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, maka PKL sangat berhak memperoleh kenyamanan berusaha berupa penciptaan iklim berusaha yang kondusif

dari pemerintah. Dalam konteks ini, Kementerian Koperasi dan UKM menawarkan kerjasama dengan pemerintah kota/kabupaten/propinsi program penataan & pemberdayaan PKL yang dilakukan melalui pendekatan kelembagaan Koperasi. Jadi kelompok PKL yang tadinya berhimpun dalam bentuk paguyuban, kelompok atau sentra diarahkan menjadi lembaga yang berorientasi peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Penutup

Wirausaha pada sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima(PKL), lebih mulia dibandingkan dengan lulusan sarjana yang tidak jelas kerjanya. Menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan mempunyai keterampilan serta daya saing yang tinggi dalam persaingan global juga mampu mengatasi pengangguran; hal ini bisa dilakukan dengan membangun semangat dan kreativitas akan memulai bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) 2004-2005.*
- Damanhuri, Didin S., *SDM Indonesia Dalam Persaingan Global*, Jakarta: Duniaesai, 2006.
- “Dinamika UMKM”, *Media BPR*, No. 11, Agustus-September 2006.
- Gunawan, “Pengangguran Hanya Bisa Dikurangi”, *Kompas*, 2000.
- Hidayati, Nur, “Menghitung Angka Pengangguran dan Harapan Yang Raib”, *Kompas*, 2005.
- Ismawan, Bambang, *Merajut Kebersamaan dan Kemandirian Bangsa Melalui Keuangan Mikro untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Menggerakkan Ekonomi Rakyat*, 2003.
- Mubyarto, “Tantangan Ilmu Ekonomi dalam Menanggung Kemiskinan”, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 2003.
- Rahardjo, M. Dawam, *Menuju Indonesia Sejahtera: Solusi Konkret Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Rustiadi, Ernan, dkk., *Agropolitan Strategi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pada Kawasan Pedesaan*, Bogor: Crestpent Press, 2008.
- Sinuraya, Daulat, “Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia”, *Suara Pembaruan*, 2004.
- Sudarma dan Suryana, Yuyus, “Perilaku Membeli Pengaruhi Pengangguran”, *Pikiran Rakyat*, 2004.
- Susanto, Agus, “Penganggur Bermasalah Sejak Definisi”, *Kompas*, 2001.
- Zaki, “Pengangguran di Indonesia 11 Juta Orang”, *Tempo*, 2005.

